

## **Pengaruh Kebijakan Moneter di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia**

**Diyu\***

**Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

E-mail Korespondensi\*: [diodiyu9@gmail.com](mailto:diodiyu9@gmail.com)

**Rachmania**

**Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

E-mail: [rachmania\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:rachmania_uin@radenfatah.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan moneter terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia, menjelaskan mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam sistem keuangan syariah, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap kinerja dan stabilitas lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode *literature review*, dengan mengacu pada berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel akademis, laporan resmi, dan dokumen yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah melalui pengelolaan likuiditas, mobilisasi dana, penyaluran pembiayaan, serta penguatan stabilitas sistem keuangan. Meskipun lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah tanpa menggunakan sistem berbasis bunga, perubahan kebijakan moneter tetap memengaruhi kegiatan operasional dan kinerja lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, pengembangan instrumen moneter yang sesuai syariah, penguatan tata kelola, inovasi produk, serta sinergi antara regulator dan industri merupakan strategi kunci untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang adaptif dan selaras dengan karakteristik sistem keuangan syariah diharapkan dapat memperkuat stabilitas serta meningkatkan kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

**Kata Kunci:** Kebijakan Moneter, Lembaga Keuangan Syariah, Instrumen Moneter Syariah, Kinerja Keuangan, Stabilitas Keuangan

### **PENDAHULUAN**

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional melalui pengendalian jumlah uang beredar, pengendalian inflasi, serta pemeliharaan stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam penerapannya, kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting terhadap aktivitas sektor keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Meskipun lembaga keuangan syariah tidak menerapkan sistem bunga, perubahan kebijakan moneter tetap memengaruhi kondisi likuiditas, penghimpunan dana masyarakat, penyaluran pembiayaan, serta stabilitas operasional lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan moneter dalam mendukung perkembangan industri keuangan syariah menjadi isu yang perlu mendapat perhatian seiring meningkatnya kontribusi sektor keuangan syariah terhadap perekonomian nasional (Nuraini *et al.*, 2025).

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang positif dari tahun ke tahun. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2024 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan meningkatnya nilai aset, pembiayaan, serta penghimpunan dana masyarakat. Di sisi lain, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan moneter melalui optimalisasi berbagai instrumen moneter syariah, seperti Sukuk Bank Indonesia (SukBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). Penguatan instrumen tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas moneter sekaligus mendorong daya saing industri keuangan syariah di Indonesia (2024 *Booklet Perbankan Indonesia 1*, 2024).

Di tengah pertumbuhan yang cukup pesat, lembaga keuangan syariah masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam merespons dinamika kebijakan moneter. Perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia, tekanan inflasi, fluktuasi nilai tukar, serta ketidakpastian ekonomi global dapat memengaruhi preferensi masyarakat dalam menyimpan dana maupun mengajukan pembiayaan. Selain itu, karakteristik sistem keuangan syariah yang mengedepankan prinsip bagi hasil menyebabkan mekanisme transmisi kebijakan moneter berbeda dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Kondisi tersebut menuntut adanya kebijakan moneter yang adaptif agar mampu menjaga stabilitas lembaga keuangan syariah sekaligus meningkatkan efektivitas fungsi intermediasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Evi Nur Safitri & Islamiyah, 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji keterkaitan antara kebijakan moneter dan perkembangan lembaga keuangan syariah. Winarto dan Beik menyimpulkan bahwa instrumen moneter syariah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi melalui mekanisme pembiayaan perbankan syariah. Kebijakan moneter bersama variabel makroekonomi berpengaruh terhadap ketahanan dana pihak ketiga pada perbankan syariah (Winarto & Beik, 2024). Penelitian Ambawani dan Wahyudi menunjukkan bahwa kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial memiliki pengaruh terhadap risiko pembiayaan pada bank umum syariah. Selanjutnya, sistem moneter ganda di Indonesia memiliki jalur transmisi yang berbeda antara sektor konvensional dan syariah, kebijakan moneter berbasis syariah dibangun atas prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan praktik riba (Ambawani & Wahyudi, 2024).

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi dalam menjelaskan hubungan antara kebijakan moneter dan lembaga keuangan syariah, sebagian besar kajian masih menitikberatkan pada satu indikator tertentu, seperti pembiayaan, likuiditas, atau risiko pembiayaan. Penelitian yang mengintegrasikan berbagai dampak kebijakan moneter terhadap kinerja lembaga keuangan syariah secara menyeluruh masih relatif terbatas. Oleh sebab itu, artikel ini berupaya memberikan perspektif yang lebih komprehensif dengan mengkaji pengaruh kebijakan moneter terhadap lembaga keuangan syariah melalui berbagai aspek, meliputi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, likuiditas, serta stabilitas lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa persoalan yang perlu dikaji meliputi bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia, bagaimana mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam sistem keuangan syariah, serta bagaimana dampaknya terhadap kinerja dan stabilitas lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan moneter terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia, menjelaskan mekanisme transmisinya, serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan industri keuangan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode Library Research atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data penelitian melalui berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema pengaruh kebijakan moneter terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga pemerintah, serta dokumen yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan perkembangan lembaga keuangan syariah.

Dalam penelitian kepustakaan ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data secara langsung melalui observasi lapangan, melainkan melakukan kajian terhadap berbagai sumber tertulis yang telah tersedia. Peneliti berhadapan langsung dengan berbagai teks, dokumen, dan hasil penelitian terdahulu untuk memahami konsep, teori, serta temuan-temuan yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan lembaga keuangan syariah.

Proses analisis dilakukan dengan cara menelaah, mengidentifikasi, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai literatur yang diperoleh untuk menemukan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui metode Library Research ini, peneliti berusaha memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme kebijakan moneter, instrumen moneter syariah, serta pengaruhnya terhadap perkembangan, stabilitas, dan kinerja lembaga keuangan syariah di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Moneter dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia**

Berdasarkan hasil kajian literatur, kebijakan moneter merupakan salah satu faktor eksternal yang memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan dan keberlangsungan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas moneter tidak hanya berorientasi pada pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai mata uang, tetapi juga berperan dalam menciptakan kondisi ekonomi yang mendukung aktivitas lembaga keuangan. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional turut merasakan dampak dari perubahan kebijakan moneter, terutama dalam aspek pengelolaan likuiditas, penghimpunan dana, serta penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.

Penerapan kebijakan moneter dalam sistem keuangan Indonesia memiliki karakteristik tersendiri karena menggunakan sistem keuangan ganda (dual financial system), yaitu keberadaan sistem konvensional dan sistem syariah secara bersamaan. Lembaga keuangan syariah memiliki mekanisme operasional yang berbeda karena berlandaskan prinsip bagi hasil, larangan riba, serta transaksi berbasis aset. Oleh sebab itu, instrumen kebijakan moneter yang diterapkan pada sektor syariah perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip tersebut agar tetap mampu menjalankan fungsi pengendalian ekonomi secara efektif. Hasil penelitian Lukito, Wulpiah, dan Taufik menunjukkan bahwa perkembangan kebijakan moneter syariah di Indonesia terus mengalami penguatan melalui pengembangan instrumen yang mendukung stabilitas dan pengelolaan likuiditas lembaga keuangan Syariah (Lukito et al., 2023).

Perkembangan lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Stabilitas moneter yang terjaga dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan syariah. Ketika kondisi ekonomi berada dalam keadaan stabil, lembaga keuangan syariah memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan aktivitas pembiayaan dan memperluas fungsi intermediasi. Sebaliknya, perubahan kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memberikan tekanan terhadap kinerja lembaga keuangan syariah, khususnya dalam menjaga kualitas pembiayaan dan mengelola risiko keuangan (Ikram, 2026).

Selain berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, kebijakan moneter juga memiliki kontribusi terhadap penguatan industri keuangan syariah melalui penciptaan lingkungan yang mendukung inovasi dan peningkatan daya saing lembaga keuangan syariah. Perkembangan teknologi keuangan, peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis syariah, serta tuntutan efisiensi dalam industri keuangan mendorong lembaga keuangan syariah untuk terus melakukan adaptasi. Penelitian Afif dan Samsuri menjelaskan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia menghadapi peluang besar melalui integrasi teknologi keuangan, namun tetap memerlukan dukungan regulasi dan penguatan sistem agar mampu meningkatkan inklusi keuangan syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal lembaga, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan ekonomi dan regulasi yang tepat (Afif & Samsuri, 2022).

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Keberadaan kebijakan moneter yang tepat dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah melalui pengelolaan likuiditas, penguatan instrumen syariah, dan peningkatan stabilitas sistem keuangan. Namun, keberhasilan penerapan kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh kemampuan lembaga keuangan syariah dalam melakukan inovasi, meningkatkan tata kelola, serta menyesuaikan diri terhadap perubahan ekonomi. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan moneter dan perkembangan lembaga keuangan syariah menjadi aspek penting dalam memperkuat sistem keuangan syariah Indonesia.

## **2. Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Indonesia**

Kinerja lembaga keuangan syariah pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal lembaga, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi eksternal, salah satunya adalah kebijakan moneter. Perubahan arah kebijakan moneter yang dilakukan oleh otoritas moneter dapat memberikan dampak terhadap aktivitas operasional lembaga keuangan syariah, baik dalam aspek penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. Hal ini disebabkan karena kebijakan moneter memiliki hubungan dengan kondisi likuiditas dan stabilitas sistem keuangan yang menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan aktivitas lembaga keuangan syariah (Wahyudi et al., 2025).

Salah satu bentuk pengaruh kebijakan moneter dapat dilihat melalui perubahan kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi. Ketika kondisi moneter mendukung, lembaga keuangan syariah memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dan sektor produktif. Sebaliknya, apabila terjadi tekanan ekonomi akibat perubahan kondisi moneter, lembaga keuangan syariah perlu melakukan penyesuaian terhadap strategi pembiayaan untuk menjaga kualitas aset dan mengurangi potensi risiko yang dapat muncul.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai literatur, instrumen dan kebijakan moneter memiliki keterkaitan dengan tingkat stabilitas perbankan syariah. Perubahan variabel ekonomi seperti inflasi dan kondisi likuiditas dapat memengaruhi keputusan manajemen lembaga keuangan syariah dalam menentukan kebijakan pembiayaan. Penelitian Alharbi dkk, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi makro memiliki hubungan terhadap kinerja perbankan syariah karena perubahan lingkungan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan bank dalam mempertahankan stabilitas keuangan dan meningkatkan efektivitas kegiatan operasionalnya (Alharbi, 2017).

Selain memengaruhi stabilitas, kebijakan moneter juga berpengaruh terhadap perkembangan pembiayaan yang menjadi salah satu indikator utama kinerja lembaga keuangan syariah. Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Penelitian Sutrisno dkk, menjelaskan bahwa faktor ekonomi makro memiliki pengaruh terhadap perkembangan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kondisi kebijakan ekonomi yang stabil dapat memberikan ruang bagi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kontribusinya terhadap sektor riil (Sutrisno & Widarjono, 2022).

Dengan demikian, pengaruh kebijakan moneter terhadap kinerja lembaga keuangan syariah Indonesia dapat dipahami melalui beberapa aspek, yaitu kemampuan pengelolaan likuiditas, pertumbuhan pembiayaan, serta tingkat ketahanan lembaga dalam menghadapi perubahan ekonomi. Meskipun kebijakan moneter tidak secara langsung mengatur operasional lembaga keuangan syariah, dampaknya tetap dirasakan melalui perubahan kondisi ekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan adaptasi dari lembaga keuangan syariah agar tetap mampu mempertahankan kinerja yang baik serta berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi nasional.

### **3. Tantangan dan Strategi Penguatan Kebijakan Moneter pada Lembaga Keuangan Syariah Indonesia**

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, namun proses penguatan sistem keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama terletak pada upaya menciptakan kebijakan moneter yang mampu mengakomodasi karakteristik lembaga keuangan syariah. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang menggunakan instrumen berbasis bunga, lembaga keuangan syariah menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip bagi hasil dan transaksi berbasis aset. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan penerapan kebijakan moneter pada sektor syariah membutuhkan instrumen dan mekanisme yang sesuai agar tetap efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi (Budiman et al., 2026).

Selain persoalan karakteristik sistem, tantangan lainnya berkaitan dengan penguatan instrumen moneter syariah dalam mengelola likuiditas lembaga keuangan. Instrumen moneter syariah memiliki peran penting dalam memastikan lembaga keuangan syariah mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Hasil penelitian Anggini dkk, menunjukkan bahwa instrumen moneter syariah seperti fasilitas simpanan syariah dan pasar uang antarbank syariah memiliki keterkaitan dengan kondisi ekonomi makro, termasuk pengendalian inflasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan instrumen moneter syariah menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat efektivitas kebijakan moneter (Anggini et al., 2025).

Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menjaga stabilitas dan mengelola risiko pembiayaan. Pertumbuhan pembiayaan yang semakin meningkat harus diimbangi dengan sistem manajemen risiko yang kuat agar tidak menimbulkan permasalahan terhadap kesehatan lembaga keuangan. Penelitian Purbayanto dkk. menunjukkan bahwa aktivitas pembiayaan bank syariah perlu mendapatkan perhatian karena peningkatan risiko pembiayaan dapat memengaruhi stabilitas dan kinerja lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan pengelolaan risiko menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan industri keuangan syariah (Purbayanto et al., 2022).

Di sisi lain, perkembangan lembaga keuangan syariah juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Meskipun sektor keuangan syariah mengalami pertumbuhan, diperlukan strategi agar perannya tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, tetapi juga mampu mendukung aktivitas ekonomi produktif masyarakat. Penelitian Sakina dkk, menunjukkan bahwa perkembangan keuangan syariah memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga penguatan sektor keuangan syariah menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kontribusi ekonomi berbasis syariah (Sakinah et al., 2022).

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, strategi penguatan kebijakan moneter pada lembaga keuangan syariah perlu dilakukan melalui beberapa langkah, seperti pengembangan instrumen moneter syariah, peningkatan koordinasi antara regulator dan industri keuangan syariah, serta penguatan inovasi produk keuangan. Selain itu, peningkatan literasi masyarakat terhadap keuangan

syariah juga menjadi faktor pendukung agar lembaga keuangan syariah dapat berkembang secara lebih luas. Dengan adanya strategi tersebut, kebijakan moneter syariah diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, inklusif, dan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam penerapan kebijakan moneter pada lembaga keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek instrumen, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, manajemen risiko, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi. Oleh karena itu, penguatan kebijakan moneter syariah membutuhkan sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat agar perkembangan industri keuangan syariah dapat berjalan secara berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan, kinerja, dan stabilitas lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pengaruh tersebut tercermin pada aspek pengelolaan likuiditas, penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi. Meskipun sistem keuangan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem konvensional karena berlandaskan prinsip bagi hasil dan larangan riba, kebijakan moneter tetap menjadi faktor penting yang memengaruhi aktivitas operasional lembaga keuangan syariah.

Selain memberikan peluang bagi pertumbuhan industri keuangan syariah, implementasi kebijakan moneter juga menghadapi berbagai tantangan, seperti penguatan instrumen moneter syariah, pengelolaan risiko pembiayaan, peningkatan inovasi produk, serta penyesuaian terhadap dinamika ekonomi global. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga keuangan syariah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan kebijakan moneter yang adaptif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan dukungan regulasi yang tepat, penguatan tata kelola, serta peningkatan literasi keuangan syariah, kebijakan moneter diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan syariah yang lebih stabil, inklusif, dan berdaya saing sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afif, M., & Samsuri, A. (2022). Integration of fintech and Islamic banking in Indonesia: Opportunities and challenges. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 17(1), 27–38.
- Alharbi, A. T. (2017). Determinants of Islamic banks' profitability: international evidence. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(3), 331–350.
- Ambawani, F. N. P., & Wahyudi, A. (2024). Pengaruh Kebijakan Moneter dan Makroprudensial terhadap Risiko Kredit di Bank Umum Syariah

- Periode 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 130–137.
- Anggini, K., Sari, C. A., Fitri, R., & Hasanah, N. (2025). Analysis the Effect of Sharia Monetary Operations (OMS) on Inflation in Indonesia for the 2019-2021 Period. *AL-MUZARA'AH-Journal of Islamic Economics & Finance*, 13(2), 271.
- Budiman, M. F. A. P., Rizki, M., & Setyanoor, E. (2026). Transformasi ekonomi moneter Islam di Indonesia pada era digital: Peluang dan tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 2781–2788.
- Booklet Perbankan Indonesia 1. (2024).
- Evi Nur Safitri, & Islamiyah. (2024). Alur Transmisi Kebijakan Moneter Ganda . *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6 SE-Articles), 5062 – 5072. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.2255>
- Ikram, M. A. D. (2026). Dampak Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Stabilitas Ekonomi dan Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 1–9.
- Lukito, R. M., Wulpiah, W., & Taufik, A. (2023). Kebijakan Moneter Syariah di Indonesia. *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social*, 1(1), 34–43.
- Nuraini, I. L., Mukarromah, S. S., Putri, Z. D. D., & Astuti, R. P. (2025). Evaluasi efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 207–213.
- Purbayanto, M. A. H., Faturohman, T., Yulianti, Y., & Aliludin, A. (2022). Do Islamic Banks in Indonesia Take Excessive Risk in Their Financing Activities? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 149–160.
- Sakinah, G., Kasri, R. A., & Nurkholis, N. (2022). Islamic finance and Indonesia's economy: An empirical analysis. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 47–59.
- Sutrisno, S., & Widarjono, A. (2022). Is profit-loss-sharing financing matter for Islamic Bank's Profitability? The Indonesian Case. *Risks*, 10(11), 207.
- Wahyudi, T., Bakar, M. H. Bin, & Soleha, N. (2025). Digital transformation, intellectual capital, and Sharia compliance in Indonesian Islamic banking. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 182–201.
- Winarto, F. H., & Beik, I. S. (2024). The effect of Sharia monetary policy instruments and Islamic bank financing on economic growth and inflation. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 72–89.